KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA PASCA TERBAKARNYA ISTANA PAGARUYUNG TAHUN 2007-2009

SKRIPSI

Oleh:

NELFI

06 193 028

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ABSTRAK

NELFI, 06193028, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Pembiming I Drs. Rinaldi Eka Putra M.Si dan Pembimbing II Doni Hendrik S.IP. S.Soc, SC. Judul Skripsi "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Pasca Terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007-2009"

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah pariwisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung yang berdampak terhadap turunnya kunjungan wisata dan pendapatan daerah sektor wisata. Disini juga melihat kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan, khususnya teori James Anderson untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah publik. Dimana pada masalah pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar diperlukan kebijakan yang tepat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada untuk meningkatkan kunjungan juga PAD sektor wisata dalam mengembangkan pariwisata daerah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara kualitatif melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan dengan pemilihan informan secara sengaja (*Purposive Sampling*), sedangkan unit analisis penelitian ini adalah lembaga yaitu DPRD Kabupaten tahan datar , dinas seni dan pariwisata daerah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten tanah datar, serta dengan melakukan uji keabsahan data secara triangulasi untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa masalah dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah publik tersebut belum dapat diatasi dengan baik. Pemerintah hanya memprioritaskan kepada pembangunan Istana Pagaruyung yang masih berlangsung saat ini, jadi masalah pariwisata yang ada selama pembangunan menjadi tidak teratasi. Kebijakan seperti ini juga mempunyai alasan karena keterbatasan dana dan pemerintah sendiri belum mempunyai RIPPDA atau *master plan* dalam pengembangan pariwisatanya agar pariwisatanya terarah dan bisa bersaing dengan daerah lainnya jadi banyak investor yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain itu kerjasama pemerintah, masyarakat, dan juga stake holder sebagai pelaksana di lapangan harus saling bekerjasama. Disamping itu di Kabupaten Tanah Datar juga belum adan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) dan ASITA (Asosiasi Tourisme Indonesia) yang dapat mengawasi perkembangan pariwisata daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Formulasi masalah, Formulasi kebijakan, Penentuan kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah ini ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah[1]. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[2].

Dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

---

[1]HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Pt. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2005 hlm. 5

[2] Lebih lanjut lihat Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (7).

penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten atau Kota karena berhubungan langsung dengan masyarakat[3].

Daerah otonom harus mampu mengelola potensi yang ada didaerahnya untuk kemajuan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan[4].

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara bagi pelaksanaan otonomi yang menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Jadi untuk membuat suatu daerah lebih mandiri mengharuskan Pemerintah daerah agar menjadi kuat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di daerahnya sendiri dengan langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinya dan mampu

---

[3] Intan Puspita, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Di surakarta* . Fakultas Ekonomi. Universitas Muhamadiah. Surakarta.2007, hlm. 2
[4] *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peneliti berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan sektor pariwisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007-2009. Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2007-2009 belum mengalami perkembangan dan peningkatan wisata.

Pada tahap formulasi masalah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyadari adanya masalah yang terjadi disektor wisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung, seperti masalah penurunan kunjungan wisata, penurunan PAD sektor wisata, dan masalah penurunan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata.

Pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah membuat alternative untuk memecahkan masalah pariwisata dengan mengumpulkan donator se Indonesia yang bertempat dikediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat saat itu guna mendanai pembangunan kembali Istana Pagaruyung.

Pada tahap penentuan kebijakan sendiri,

Tahun 2007:

a. Mengumpulkan donator se Indonesia untuk mendanai Pembanguna Istana Pagaruyung kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. 2002.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2003.

Hartanto, Frans Mardi. *Menjelang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan*: Perspektif perencanaan kebijaksanaan (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan) ITB, Bandung, 1997.

Kusmayadi & Endar Sugiarto. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.2000.

Janianton Damanik & Helmut F. Weber. *Perencanaan Ekowisata. Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta.Andi. 2007.

Moleong, j lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. bandung; rosda .2009.

Naihasy, Syahrin. *Kebijakan Publik (Public Policy) menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta.Midi Pustaka. 2006.

Nasrul chan, *Pariwisata Sumatera Barat Dan Alternative Pengembangannya*. disajikan pada seminar Pariwisata dalam rangka lustrum keVIII Univeritas Andalas. Padang. 1996.

Nasution. 1992.*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung; Tarsito.

Oka A. Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Ref.ed, Penerbit Angkasa Bandung.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gabriel Lele. 1999. *Postmodernisme Dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*, Dalam JSP, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Pitana, I gde.dkk . *Pengantar Ilmū Pariwisata*. penerbit andi. Yogyakarta.2009.

Riant D Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo kelompok gramedia. 2003.